

miskin yang telah berusia lanjut, anak-anak yatim di bawah umur, dll. Tetapi kepada orang miskin yang sebenarnya punya potensi, memberi langsung (*charity*) justru dapat berakibat tidak baik. Ibarat pepatah, “*memberi kail lebih baik dibandingkan dengan memberi ikan*”. Memberi ikan hanya dapat makan untuk saat itu saja, sedangkan memberi kail maka dapat makan untuk jangka waktu yang lebih panjang.”

Oleh karena itu, pendapat yang menyatakan *charity* lebih baik dibandingkan dengan suatu pendekatan pemberdayaan jelas harus dikoreksi. Program pemberdayaan mungkin saja manfaatnya tidak segera diterima oleh si miskin, tetapi manfaatnya akan terasa dalam jangka panjang.

Dalam hadits di atas, seandainya Rasulullah SAW berprinsip *charity*, maka Beliau akan langsung memberi uang atau barang kepada sahabat anşar ketika ia memintanya bantuan kepada Rasulullah SAW. Namun yang dilakukan Rasulullah tidak demikian, Ia melakukan sesuatu yang manfaatnya tidak segera diterima.

Ada beberapa proses yang harus dilalui, sehingga sahabat tersebut menerima manfaat. Pertama, ia harus pulang terlebih dahulu untuk membawa beberapa barangnya. Yang kedua, ia harus menunggu berkumpulnya para sahabat yang lain untuk mengikuti lelang. Yang ketiga, ia harus mengikuti proses lelang hingga selesai. Tidak dijelaskan dalam hadits di atas ketiga tahapan itu berapa lama, namun jelas itu memerlukan waktu.

Ketika barangnya telah dibeli, dan uangnya ada, ternyata tidak semua uang hasil lelang itu diberikan kepada sahabat. Artinya sahabat tidak dapat segera menerima seluruh manfaat dari hasil pelelangan baranya tersebut, manfaatnya masih ada yang ditahan. Setengahnya

kemudian mendapatkan uang melalui: penjualan asetnya dan hasil usaha kayu bakar.

Dari uraian di atas, dapat dipahami betapa pentingnya pengembangan sumber daya manusia untuk tenaga pendamping masyarakat (fasilitator). Dari sejumlah dana pemberdayaan masyarakat miskin, seharusnya disisihkan beberapa di antaranya untuk pengembangan SDM tenaga pendamping.

Masyarakat miskin tidak hanya perlu dana. Seperti hadits di atas, sahabat diberdayakan bukan dengan diberi uang tetapi melalui proses pembinaan (pendampingan) yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dengan demikian untuk mengatasi permasalahan kemiskinan selain adanya dana yang akan digunakan oleh masyarakat miskin, yang jauh lebih penting dari itu adalah adanya para tenaga pendamping yang sabar, amanah dan profesional.

Tidak sedikit orang memandang remeh akan kebutuhan SDM yang handal bagi pemberdayaan masyarakat. Kita perlu bercermin dari pengalaman nyata sebuah lembaga pemberdayaan yang relatif dianggap berhasil. Sebagai contoh adalah “Purbadanarta” dan BMH. Tenaga Lapangan yang mereka istilahkan dengan tenaga “Pembina Purna Waktu” (PPW) adalah S-1 yang direkrut dari hasil seleksi bertahap / berlapis yang sangat ketat. Kemudian mereka menjalani masa pendidikan selama 2,5 tahun barulah diangkat sebagai karyawan tetap. Konon investasi terbesar dari lembaga itu adalah pada pengembangan SDM. Di BMH ada istilah pembinaan *marhalah* untuk SDM.

Sayangnya, selama ini pada program pemberdayaan yang ada, anggaran untuk pengembangan SDM umumnya sangat kecil bahkan sering tidak ada sama sekali. Ketika ada dana untuk pemberdayaan, kemudian dibuat untuk anggaran Pengembangan SDM, umumnya

alasan dari pihak yang menolak adalah, “Bukankah dana ini diamanahkan untuk masyarakat miskin? Kalau digunakan untuk pelatihan staf pendamping, bukankah yang menerima uang adalah para pelatih dan *organizer*-nya?”

Kalau memang ada yang berpendapat seperti ini, maka perlu diluruskan. Pertama, yang akan dicapai adalah pemberdayaan masyarakat miskin, sehingga mereka dapat terangkat dari kemiskinannya, bukannya menyerahkan sejumlah uang kepada si miskin. Kalau tujuannya adalah menyerahkan uang kepada masyarakat miskin, maka mudah sekali, tinggal serahkan saja uangnya, bereslah sudah. Tetapi bila tujuannya pemberdayaan, maka bukan seperti itu, tetapi memerlukan suatu proses, yang salah satu di antaranya adalah peningkatan kualitas SDM tenaga pendamping.

Kedua, banyak yang menganggap masalah terbesar dari masyarakat miskin adalah tiadanya uang. Memang itulah yang kasat mata. Namun, dari beberapa hasil penelitian menyatakan bahwa permasalahan masyarakat bukan semata-mata masalah uang. Bahkan dari hadits di atas pun menyatakan bahwa bukan itu masalahnya. Pada hadits di atas, mula-mula sahabat pun merasa bahwa masalah dia adalah tiadanya uang yang dia miliki. Maka di awal hadits dinyatakan bahwa maksud kedatangannya kepada Rasulullah SAW adalah untuk meminta sesuatu. Apakah kemudian Rasulullah SAW meluluskan permintaannya dengan memberinya sesuatu? Tidak. Tidak sama sekali. Yang Rasulullah, SAW berikan adalah suatu pendampingan.

Permasalahan masyarakat miskin tidak hanya berkisar tentang uang, tetapi banyak sekali. Dari hadits di atas secara ringkas permasalahan shahabat tersebut adalah lemahnya pengetahuan yang bersangkutan tentang potensi diri, penggunaan (optimalisasi) potensi

- c. Keanekaragaman. Sama halnya dengan aspek pengakuan nilai-nilai lokal maka kebijakan dan perlakuan yang seragam dalam melakukan pemberdayaan masyarakat tidak efektif bahkan kontra produktif.
- d. Partisipasi. Aspek partisipasi adalah syarat pemberdayaan, karena dengan partisipasi, maka rasa kebersamaan muncul. sehingga dapat mendorong untuk merumuskan dan memecahkan masalah yang dihadapi dalam suatu komunitas. Partisipasi juga dapat menyatukan potensi, baik pikiran dan tenaga dalam suatu kelompok masyarakat tertentu.
- e. Hak asasi dan keadilan. Mengingat pemberdayaan yang sebagian diakui sebagai proses untuk mendapatkan kembali power, saama dalam interaksi ini harus ada penegakan hukum yang demokratis dan berkeadilan. Tanpa ini maka pemberdayaan menjadi sia-sia.
- f. Lingkungan yang kondusif. Pemberdayaan juga memerlukan lingkungan yang kondusif. Abik struktur, sistem dan suasana yang mendukung terwujudnya pemberdayaan. Kebijakan (ekonomi, politik dan sosial) harus dapat memberikan atmosfer yang segar bagi inisiatif masyarakat untuk melakukan perubahan.
- g. Keberpihakan. Sebagaimana diungkapkan dalam banyak *literature*, dimana ketidakberdayaan adalah juga disebabkan “kalahnya” atau “terpinggirkannya” masyarakat oleh struktur dan sistem, untuk menjadikan berdaya, maka perlu ada *treatment* khusus bagi kelompok ini. oleh karena itu, harus ada kebijakan sementara, keberpihakan terhadap kelompok masyarakat ini. Tanpa ini, maka usaha-usaha peningkatan kapasitas individu, penegakan hak asasi, dan penciptaan lingkungan yang kondusif menjadi sia-sia. Karena masyarakat ini tidak akan pernah bisa menyusul kelompok masyarakat yang lebih berdaya.

- a. Psikologi objek pemberdayaan semakin baik, sehingga membuat mereka semakin percaya diri akan potensinya untuk bisa bangkit dan berdaya.
- b. Munculnya harapan perekonomian baru yang cerah bagi objek pemberdayaan.
- c. Bertambahnya *skill* kemandirian dan kewirausahaan objek pemberdayaan.
- d. Berkurangnya angka kemiskinan di perkotaan.
- e. Berkurangnya angka anak putus sekolah di perkotaan.
- f. Bertambahnya lapangan pekerjaan di perkotaan.

2. Dampak Negatif Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota

Sebenarnya, hampir tidak ada dampak negatif dari pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin perkotaan. Namun jika pemberdayaan ini berhasil 90 % sampai 100 %, maka bisa saja berdampak negatif bagi pemerataan penduduk, karena penduduk dari daerah lain akan datang berbondong-bondong ke kota yang pemberdayaan ekonomi masyarakatnya berjalan dengan baik, yang berakibat pada membludaknya jumlah penduduk (*over load*). Sehingga pemberdayaan masyarakat miskin ini juga harus dilakukan di semua kota dan semua desa, agar tidak terjadi *over load* jumlah penduduk di daerah tertentu saja.